

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat krusial, berbagai macam teori maupun kebijakan ekonomi di terapkan dalam rangka mencapai dan mengusahakan tujuan bersama yang diterjemahkan sebagai kesejahteraan hidup. Secara ekonomi kesejahteraan hidup suatu negara biasa diukur melalui instrument Pendapatan Asli Daerah/PDB (*growth*), pendapatan per kapita (*per capita income*) dan Pengeluaran Pemerintah Daerah (Kusnandar, 2012).

Pencapaian tujuan pembangunan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, dan selalu ada penekanan pada pemenuhan tujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikan universal, peningkatan kesehatan, dan pemberantasan Pengeluaran Pemerintah Daerah. Hal ini tercermin dalam misi Presiden yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2011-2015.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan

kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswantoro, 2012)

Berdasarkan desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan

wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan/BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik.

Bambang Agus Pramuka (2010) telah meneliti untuk mengetahui Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa. pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari anggaran mereka. DAU (hibah) dan PAD (pendapatan asli), bagaimanapun, terbukti secara signifikan mempengaruhi operasi, modal, dan total

pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Febrian Dwi Prakarsa (2013) mengenai Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Jawa Timur. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ini juga memperlihatkan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah justru menghambat Pendapatan Asli Daerah daerah.

Ardiansyah dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Provinsi Jawa Timur dikategorikan cukup berhasil dalam menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah nya dengan disertai penggunaan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk belanja modal. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan Pengeluaran Pemerintah Daerah di provinsi tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ini dalam mencapai kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Implikasi penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal dalam upaya-

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seyogyanya sudah menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai itu.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menguji tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penggunaan belanja modal serta mengetahui peningkatan kualitas pembangunan manusia.
2. Penelitian ini dapat berharap menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian.

Bab ini berisi tentang Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dan Pengeluaran Pemerintah Daerah, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan. Membahas ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data , metode pengumpulan data dan metode analisis data secara terperinci.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari pengujian statistic yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang simpulan simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya